

Abstrak

Perlindungan atas dasar kepentingan konsumen sangat diperlukan dikarenakan pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Karena konsumen selalu berada di pihak yang lemah maka dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) perlu dianalisa alasan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap pembatalan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara serta akibat hukum yang timbul dari putusan ini.

Penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aproach), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis secara preskriptif analitis yaitu dengan merumuskan atau menafsirkan kasus sehingga dapat memberikan preskripsi dan dapat memberikan konklusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang mengadili di tingkat Kasasi sudah cermat, jelas dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum. Dikarenakan dalam putusannya Mahkamah Agung mengacu pada klausul perjanjian yang dibuat antara konsumen dan pelaku usaha yang didalamnya memuat bahwasannya Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berwenang mengadili perkara apabila terjadi sengketa, sehingga dari ketentuan pembukaan tersebut secara otomatis jika terdapat sengketa maka Basyarnaslah yang berwenang memeriksa dan mengadili bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci: pembatalan, putusan BPSK , klausul arbitrase.

Abstract

Protection on the basis of consumer interests is needed because in general consumers are always on the side of the losers. Because consumers are always on the weak side, in Decision Number 1162 K / Pdt.Sus.BPSK / 2017) it is necessary to analyze the reasons of the Supreme Court (MA) panel of judges for the cancellation of the Medan District Court's decision and declare the Medan Consumer Dispute Resolution Board (BPSK) not authorized to examine and try cases and legal consequences arising from this decision.

This research is a normative study using the statutory approach (Statute Approach), using primary and secondary legal materials. The legal material obtained is then reviewed and analyzed in a prescriptive analytical manner by formulating or interpreting the case so that it can provide a prescription and be able to provide a conclusion based on the applicable law in Indonesia.

The results of this study indicate that the Supreme Court as a state institution that tried at the Cassation level was thorough, clear and appropriate in providing legal considerations. The National Sharia Arbitration Board which prosecutes the case is demanded to fix it. the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency

Keywords: revocation, verdict of BPSK, arbitration clause.